pelaku dan masyarakat. Korban adalah pihak pertama yang paling dirugikan oleh karena kejahatan. Ia menderita secara fisik dan mental. Bisa jadi ia menderita kehilangan kehormatan karena diejek, dipermalukan, dilecehkan atau diperkosa.

Kedua, berkaitan dengan cita-cita pemulihan (restorasi) di atas, keadilan restoratif fokus pada kebutuhan tiga pihak, yaitu korban, pelaku kejahatan dan masyarakat, yang tidak dipenuhi oleh proses peradilan. Dalam proses peradilan, korban tindak kejahatan diabaikan, karena tindak kejahatan dimengerti sebagai tindakan yang melawan atau merugikan Negara. Peranan korban diambilalih oleh negara. Negaralah yang mempunyai tanggung jawab menghukum pelaku tindak kejahatan, sementara korban tindak kejahatan tidak mendapatkan hak apa-apa. Hukuman yang diberikan pada pelaku tindak kejahatan sama sekali tidak bersangkutan paut dengan penderitaan korban. Dalam hal inilah kebutuhan korban diabaikan. Oleh karena itulah keadilan restorative akan fokus pada kebutuhan korban.

Ketiga, kewajiban restoratif memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab yang muncul oleh karena tindak kejahatan. Pelaku kejahatan wajib memulihkan kerusakan yang diderita korban, dan masyarakat. Kewajiban terhadap korban dilakukan pertama-tama dengan mengakui bahwa ia bersalah. Pengakuan ini penting, karena ini merupakan bukti pengakuan atas penderitaan yang dialami korban. Korban membutuhkan untuk didengarkan diakui penderitaannya. Pengakuan dan permohonan maaf tersebut merupakan proses yang penting di dalam penyembuhan luka-luka batin dan penderitaan mental korban. Setelah itu, pelaku kejahatan mempunyai kewajiban untuk memulihkan

penderitaan fisik dan material. Kewajiban ini dapat dipenuhi dengan memberikan kompensasi untuk membayar biaya penyembuhan luka-luka fisik dan mengganti kehilangan materi korban.

1. Realitas Sanksi Pidana

Apa sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dalam sebuah pemidanaan? Apakah untuk menciptakan efek jera? Apakah untuk menciptakan keteraturan dan keamanan? Apakah untuk menciptakan tegaknya aturan hukum? Banyak jawaban yang terlontar, namun yang pasti tolak ukur keberhasilannya sebuah sistem pemidanaan ialah bukan terletak pada banyaknya jumlah tahanan maupun narapidana yang menghuni rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan.

Sistem pemidanaan seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, *over capacity* rutan dan lapas malah berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan rutan dan lapas. Pengawasan yang lemah tidak berimbang dengan masiv-nya jumlah tahanan narapidana. Lapas seolah tidak lagi menjadi tempat yang tepat dalam me-masyarakat-kan kembali para narapidana tersebut, malah seolah Lapas telah bergeser fungsinya sebagai *academy of crime*, tempat di mana para narapidana lebih diasah kemampuannya dalam melakukan tindakan pidana.

Sudah lama sistem keadilan retributif atau punitif diragukan efektivitasnya. Hukuman seberat apapun kepada pelaku kejahatan tidak pernah memberi keamanan dan kesejahteraan pada masyarakat. Hukuman

kepada pasangan yang menikah, dan pernikahan yang tidak tercatat (secara adat) atau tidak tercatat oleh ketentuan administrasi negara. Di Indonesia masih sangat banyak pasangan yang melakukan perkawinan, justru belum di sentuh secara formal oleh administrasi negara, dan ini mungkin saja menjadi sasaran bagi tindak pidana ini.

Lagi pula sungguh sulit untuk memperkarakan kasus kumpul kebo. Karena elemen tindak pidananya menyatakan “melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah” apa indikator dari hidup bersama sebagai suami istri, tidak ada penjelasan yang dapat dijadikan standar dalam RUU KUHP. Dan ini sangat menyulitkan dalam pembuktiannya. Karena tindakan yang dikecam sebetulnya dalam praktek kumpul kebo adalah hubungan persetubuhannya.

Jika perumus KUHP ingin mengatur tindak pidana kumpul kebo atau *cohabitation* sebaiknya justru meniru rumusan kumpul kebo yang dilakukan oleh beberapa negara (masuk dalam kejahatan perkawinan) di atas, misalnya kumpul kebo dengan anak, kumpul kebo dengan cara poligami, kumpul kebo dengan cara penipuan dan kumpul kebo dengan istri/suami anggota angkatan bersenjata aktif atau anggota kepolisian aktif, justru kumpul kebo dalam konteks ini yang sangat dibutuhkan pengaturannya di Indonesia.

Di samping itu, konsep kumpul kebo harusnya termasuk ke dalam delik aduan, bukan delik pidana biasa seperti yang diatur dalam Konsep 2015. Konsep 2015 justru meniru konsep KUHP Kanada namun secara

Bedasarkan interpretasi dalam pasal 485 RUU KUHP menjelaskan setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah dikenal dengan istilah kumpul kebo. Dari ketentuan pasal 485 tentang kumpul kebo dengan maksud dan tujuan untuk mengatur bagi setiap orang (laki-laki dan perempuan) yang berada di daerah dan atau negara Indonesia menjalankan hidup bersama dalam suatu tempat tinggal, dengan mengalami kehidupan dengan cara tertentu bersama-sama, dengan seolah-olah atau selaku pasangan suami istri melakukan hubungan seksual, bahagia, dan atau bersama anak-anak dalam waktu cukup lama, tanpa adanya perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan hukum yang hidup di dalam masyarakat (hukum adat/Agama). Tujuan lain dari pasal 485 RUU KUHP yaitu untuk melindungi kesucian perkawinan dan norma-norma (kaidah-kaidah) yang ada di dalam masyarakat.¹⁵

Kewenangan menentukan interpretasi dalam penegakan hukum nantinya adalah hakim. Setiap orang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada pasal 485 tentang kumpul kebo dan memenuhi unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana, selanjutnya hakimlah yang menjatuhkan sanksi bagi pelaku kumpul kebo dengan dua pilihan sanksi pidana penjara atau pidana denda.

Berhubung hanya masih dalam Rancangan Undang-undang KUHP, maka mengenai norma hukum positif tidak memiliki dasar yang kuat. Ketentuan

¹⁵ Zainur Ridlo, *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Delik Kesusilaan: Studi Terhadap Pasal 485 RUU KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Istri di Luar Perkawinan yang Sah*, (Skripsi: Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014). 150-151.

tentang kumpul kebo ini juga masih dalam perdebatan. Masih banyak pihak yang menentang ketentuan ini dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana dengan berbagai alasan.

Praktik kumpul kebo ini sendiri sudah banyak dilakukan, baik yang secara terang-terangan maupun tersembunyi. Walaupun memang belum ada peraturan hukum yang secara jelas mengatur, norma yang digunakan hanya norma agama, norma kesusilaan dan kesopanan/adat dalam menghakimi pelaku kumpul kebo tersebut. Maka, secara tidak langsung bahwa delik kumpul kebo bukannya bebas dari hukum, tapi akan juga dikenai sanksi diluar hukum yang tertulis.

Berkaitan pula bahwa keadaan ini sangat terikat oleh hukum-hukum setempat yaitu hukum adat (*local wisdom*). Artinya masyarakat lebih mampu melakukan akvokasinya terhadap persoalan atau masalah dengan cara hukum yang memulihkan, bukan menjustifikasi layaknya persidangan dipengadilan secara formal. Dalam ikatan lain jenis, pada dasarnya memang tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Indonesia telah dominan dipengaruhi oleh hukum adat. Karena masyarakat Indonesia memiliki beragam suku bangsanya, sudah barang tentu pasti beraneka ragam pula hukum adatnya yang hidup dan lestari di tanah air Indonesia.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta

bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, dan kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Dengan demikian, keberadaan pasangan kumpul kebo sangat ditentang. Perbuatan tercela tersebut dianggap menyalai norma-norma yang ada khususnya norma kesopanan/adat dan kesusilaan. Sebagai pandangan umum dalam masyarakat, adanya kumpul kebo yang terjadi di suatu tempat manapun akan secara otomatis mendapati sanksi moral terhadap dirinya sendiri bagi pelaku terhadap masyarakat. Maka, langkah yang pasti akan ditempuh adalah dinikahkan sebagai wujud ikatan suci dan sebagai solusi pemulihan atau keadilan restorasif bagi yang telah melakukan praktek kumpul kebo. Namun tidak menutup kemungkinan disetiap daerah adat tertentu akan memberikan sanksi bila telah diketahui melakukan praktek itu sebelum dinikahkan.